

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan suatu bangsa, sebagaimana tercermin dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya. Sebuah negara dapat dikatakan sejahtera apabila mampu mencapai tingkat kemakmuran yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui infrastruktur ekonomi yang memadai. Sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui perbaikan strategi pembangunan ekonomi, salah satunya dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen pengentasan pengangguran dan penggerak ekonomi kerakyatan.

Urgensi penguatan UMKM tidak terlepas dari kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta mampu menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.¹ Angka ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan tulang punggung yang menentukan ketahanan ekonomi rakyat secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah pusat dan daerah menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," 2023, diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

fasilitas.² Dukungan ini diperkuat pula melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang ekonomi kreatif, yang menempatkan kreativitas berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat.³

Secara teoretis, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang ideal tidak berhenti pada peningkatan pendapatan semata, melainkan mencakup penguatan kontrol, partisipasi, dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh.⁴ Pemberdayaan yang efektif merupakan hasil sinergi antara pemberian kesempatan, fasilitasi, percontohan praktik baik, dan komunikasi yang berakar pada budaya lokal, sehingga pelaku usaha mampu tumbuh secara mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan eksternal.⁵ Dalam kerangka ideal tersebut, keberhasilan pemberdayaan UMKM juga sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mencakup aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen aparat pelaksana, struktur birokrasi, permodalan, sarana prasarana, serta kualitas sumber daya manusia.⁶ Dengan kata lain, kondisi ideal menuntut adanya keterpaduan antara inisiatif masyarakat dan dukungan kelembagaan pemerintah secara konsisten.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin di tingkat desa, salah satunya di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Secara faktual, Kabupaten Majalengka masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang cukup signifikan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 134,58 ribu jiwa atau 10,82 persen dari total penduduk, yang menempatkan Majalengka pada peringkat

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 2 ayat (1).

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ekonomi Kreatif.

⁴ Sulismadi, Safri, & Ahmad Sofwani, "Peran UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia," *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 1 (2024), hlm. 42.

⁵ Joko Suryono, Mahendra Wijaya, & Heru Irianto, "Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Non-Formal untuk Meningkatkan Kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 22, no. 3 (2023), hlm. 413

⁶ Sartika Dewi Usman Ismet Sulila, "Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Cosmopolitan Education Management Journal* 30, no. 4 (2022), hlm. 379.

kelima tertinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.⁷ Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Majalengka meningkat menjadi 71,37 pada tahun yang sama, kesenjangan kesejahteraan antarwilayah di dalam kabupaten ini, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Pasir, masih menjadi tantangan nyata.

Salah satu potensi ekonomi lokal yang dimiliki Desa Pasir adalah keberadaan UMKM pengrajin sapu tabo, yang telah berperan penting dalam ekonomi lokal warga setempat. Akan tetapi, secara aktual para pengrajin masih menghadapi berbagai kendala struktural, di antaranya akses pasar yang terbatas, keterbatasan modal usaha, minimnya keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran dan promosi produk. Kendala-kendala ini menyebabkan usaha pengrajin sapu tabo sulit berkembang secara signifikan, yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pasir secara keseluruhan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kondisi ideal pemberdayaan UMKM sebagaimana digariskan secara teoretis dan regulatif, dengan kondisi aktual yang dihadapi pengrajin sapu tabo di lapangan.

Kesenjangan tersebut diperkuat pula oleh adanya celah dalam penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM telah banyak dilakukan, baik dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan perkotaan,⁸ tradisi lokal sebagai basis pemberdayaan,⁹ digitalisasi UMKM oleh dinas terkait.¹⁰ Pada level yang lebih luas, kajian tentang peran UMKM dalam pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan di Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa UMKM dapat memperkuat jejaring sosial dan kesejahteraan komunitas apabila mendapat dukungan tepat dari

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Indikator Makro Kabupaten Majalengka 2024 (Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka, 2025).

⁸ Handika Ardana Pamungkas, "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Cibiru Kota Bandung" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

⁹ Yoila, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Tradisi Kaliwon: Studi Deskriptif di Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁰ Ishiqa Putri Ramadhany, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sistem Digitalisasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

pemerintah dan pemangku kepentingan lain.¹¹ Studi serupa di luar negeri juga menegaskan bahwa kepemilikan usaha mikro mampu meningkatkan pendapatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, meskipun kendala permodalan dan akses kredit tetap menjadi hambatan utama.¹² Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada UMKM berbasis jasa, wisata, atau digitalisasi, dan belum banyak yang secara spesifik mengkaji UMKM kerajinan berbahan baku alami skala rumah tangga di desa kecil, khususnya yang mengaitkan strategi pemberdayaan berbasis pendekatan 5P dengan peran konkret kelembagaan pemerintah desa. Di sinilah letak kekosongan (*gap*) yang berusaha diisi oleh penelitian ini, yaitu mengkaji secara spesifik strategi pemberdayaan UMKM pengrajin sapu tabo di Desa Pasir beserta dampaknya terhadap kesejahteraan dan peran lembaga pemerintah di dalamnya.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila ditinjau dari potensi geografis dan ekonomi Desa Pasir. Letaknya yang relatif dekat dengan Kota Cirebon membuka peluang besar bagi sapu tabo untuk dipromosikan ke pasar yang lebih luas, bahkan ke ranah nasional, apabila kendala produksi, pemasaran, dan kelembagaan dapat diatasi melalui strategi pemberdayaan yang tepat. Tanpa adanya kajian yang mendalam mengenai strategi pemberdayaan yang telah dan belum dijalankan, potensi besar tersebut berisiko terus berjalan secara tidak optimal, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo dijalankan, sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir, serta bagaimana peran lembaga pemerintah dalam mendukung proses tersebut. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

¹¹ Sulismadi, dkk. Op, cit., hlm. 44

¹² Beatrice Kalinda Mkenda, "Economic Empowerment of Tanzanian Women through Ownership of Tourism Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)," *Tanzanian Economic Review* 13, no. 2 (2024), hlm. 11.

terkait dalam memajukan UMKM pengrajin sapu tabo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir secara berkelanjutan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi objek kajian penelitian, sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan UMKM pengrajin sapu tabo di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana dampak strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo terhadap peningkatan kesejahteraan para pengrajin di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa Pasir dalam mendukung pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo untuk meningkatkan kesejahteraan para pengrajin?

C. Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo. Adapun tujuan lainnya dapat disusun sebagai berikut.

1. Menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan UMKM pengrajin sapu tabo di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.
2. Menganalisis dampak strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo terhadap peningkatan kesejahteraan para pengrajin di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.
3. Menganalisis peran Pemerintah Desa Pasir dalam mendukung pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pengrajin sapu tabo guna meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini yang memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial, sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat untuk dipraktikkan oleh masyarakat.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara Akademis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi pada pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan Kontribusi pada pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti, Akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini.
- b. pengembangan teori: Penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan kerangka konseptual yang relevan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
- c. peningkatan metodologi penelitian: Penelitian ini dapat memberikan panjang langkah dalam pengembangan metodologi penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan UMKM. metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus pengrajin sapu ini dapat dijadikan contoh atau referensi bagi peneliti masa depan.

2. Kegunaan Praktis

Selain memberikan kontribusi secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengrajin sapu dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Desa Pasir.

informasi ini dapat membantu pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk merancang program dan kebijakan yang lebih efektif.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang berhasil dan dapat digunakan sebagai model atau panduan bagi pengrajin sapu dan perilaku UMKM lainnya. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui UMKM di wilayah sejenis.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menginformasikan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM di tingkat lokal dan regional. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam merancang program-program yang mendukung pengrajin sapu dan UMKM lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah perubahan kehidupannya sendiri. Dalam konteks ini, UMKM menjadi salah satu instrumen pemberdayaan yang strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat, sehingga perubahan yang terjadi pada level usaha kecil dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha maupun lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, yang ditandai dengan keterbatasan akses pasar, modal usaha, serta keterampilan dan pengetahuan di kalangan pengrajin sapu tabo. UMKM pengrajin sapu tabo dijadikan unit analisis karena merupakan sektor ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja warga sekitar, namun belum dikelola secara optimal.

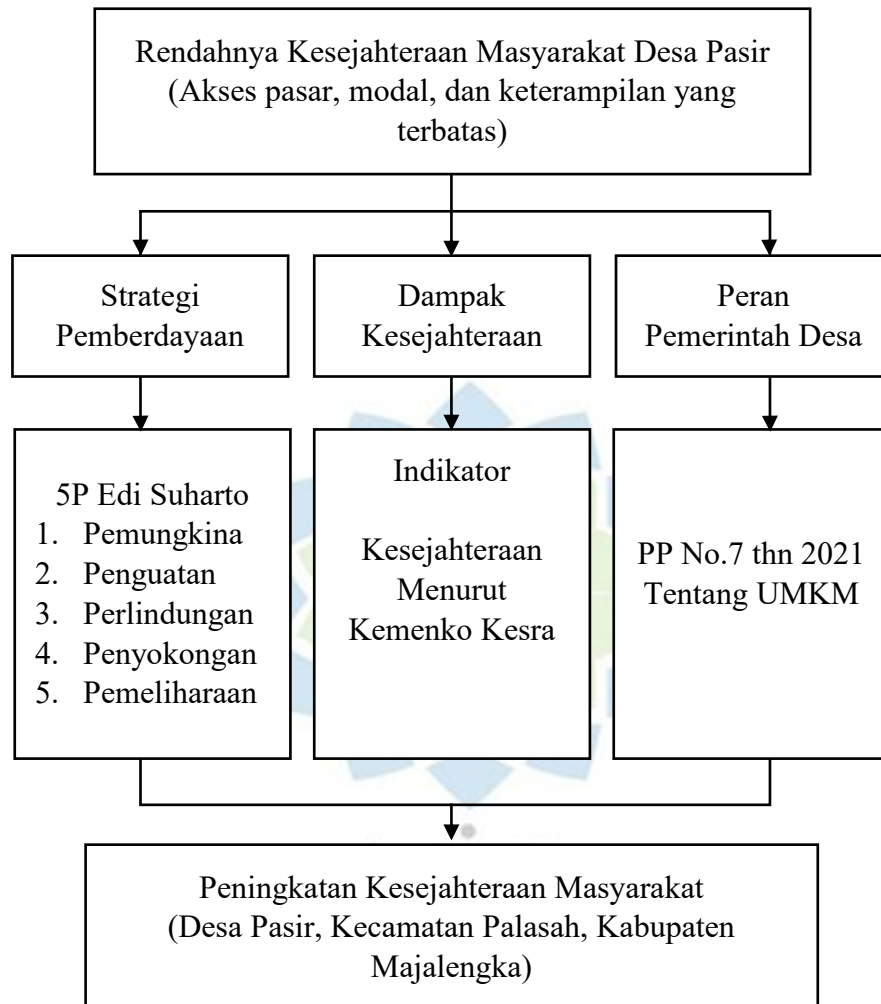
Dari fenomena tersebut, penelitian diarahkan pada tiga rumusan masalah yang saling berkaitan. Pertama, strategi pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pengrajin sapu tabo dianalisis menggunakan pendekatan 5P Edi Suharto, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, sebagai kerangka untuk memetakan langkah-langkah pemberdayaan yang sudah maupun belum berjalan. Kedua, dampak dari pemberdayaan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator kesejahteraan Kementerian, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, peran lembaga pemerintah dalam mendukung pemberdayaan dianalisis dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai landasan kebijakan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pengembangan UMKM pengrajin sapu tabo akan meningkat apabila ditunjang oleh strategi pemberdayaan yang tepat, baik dari sisi internal pengrajin maupun dari sisi dukungan kelembagaan pemerintah. Asumsi ini menjadi titik tolak yang menghubungkan antara strategi yang dijalankan oleh pengrajin secara mandiri dengan peran fasilitasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah desa, sehingga keduanya tidak berjalan secara terpisah melainkan saling melengkapi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan.

Ketiga alur analisis tersebut bermuara pada satu titik temu, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir melalui penguatan UMKM pengrajin sapu tabo secara berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antara strategi pemberdayaan yang dijalankan, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan dukungan kelembagaan pemerintah sebagai tiga pilar yang saling menopang dalam mencapai tujuan akhir penelitian.

Hubungan antarvariabel tersebut secara ringkas divisualisasikan pada Gambar 1.1, yang menggambarkan alur berpikir penelitian mulai dari kondisi awal kesejahteraan masyarakat, fokus pada UMKM pengrajin sapu tabo, tiga arah analisis berdasarkan rumusan masalah beserta landasan teorinya masing-masing,

hingga bermuara pada output akhir berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran